

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

**Oleh
ANISA AULIA FITRI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan menganalisis kesesuaian penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memperoleh indeks 3.37 atau masuk dalam predikat baik sebagaimana data hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Dengan perincian yaitu domain kebijakan dengan indeks 4.70, domain tata kelola dengan indeks 3.30, domain manajemen dengan indeks 1.64, dan domain layanan dengan indeks 3.63. Hal ini sesuai dengan Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B. Seidman, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebagai lembaga pembuat hukum memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE. Bekerjanya hukum sesuai dengan peraturan ini berkaitan dengan adanya kekuatan-kekuatan (pihak-pihak) lain di luar pemerintah provinsi, yaitu para pengguna SPBE dari instansi pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Penerapan SPBE Provinsi Lampung memiliki kesesuaian dengan 8 (delapan) dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan Teori *Good Governance*, yaitu penerapan SPBE memenuhi kepastian hukum berdasarkan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah, penerapan SPBE memenuhi asas kemanfaatan bagi penggunaanya, ketidakberpihakan dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung tentang SPBE, aplikasi SPBE yang memberikan layanan secara cermat kepada penggunaanya, perangkat daerah tidak menyalahgunakan kewenangan dalam aplikasi SPBE, keterbukaan/transparansi dalam penerapan SPBE, adanya pemenuhan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun demikian, penerapan SPBE Provinsi Lampung masih dihadapkan pada kendala yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang SPBE dan belum meratanya sosialisasi SPBE kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta domain manajemen yang masih masuk dalam kategori kurang.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kesesuaian, Penerapan, SPBE, Teori Bekerjanya Hukum.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) AT THE SERVICE OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND STATISTICS LAMPUNG PROVINCE IN REALIZING GOOD GOVERNANCE

By
ANISA AULIA FITRI

The aim of this research is to analyze the implementation of SPBE in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service and analyze the suitability of the SPBE implementation in the Lampung Province Communication, Informatics and Statistics Service with the principles of good governance. This type of research is normative-empirical legal research, used primary and secondary data. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the implementation of SPBE in the Communication, Informatics and Statistics Service of Lampung Province obtained an index of 3.37 or was included in the good predicate according to data from evaluation results by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform in 2023. In detail, namely the policy domain with an index of 4.70, the governance domain manage with an index of 3.30, management domain with an index of 1.64, and service domain with an index of 3.63. This is in accordance with William Chambliss and Robert B. Seidman's Theory of Legal Operation, namely that the Lampung Provincial Government as a law-making institution enforces the Lampung Governor's Regulation on SPBE. The operation of the law in accordance with this regulation is related to the presence of other forces (parties) outside the provincial government, namely SPBE users from central agencies, State Civil Service employees, individuals, communities, business actors and other parties. The implementation of SPBE in Lampung Province is in accordance with 8 (eight) principles of good governance and in accordance with the Good Governance Theory, namely the implementation of SPBE meets legal certainty based on regulations at both the central and regional levels, the implementation of SPBE fulfills the principle of benefit for its users, impartiality in implementation of the Lampung Governor's Regulation on SPBE, the SPBE application provides careful services to its users, regional officials do not abuse their authority in the SPBE application, openness/transparency in the implementation of the SPBE, fulfillment of public interests, and good service to the community, but the implementation of SPBE in Lampung Province is still faced with obstacles, namely still a lack of public understanding about SPBE and the uneven distribution of SPBE to all State Civil Apparatus (ASN) in Regional Apparatus Organizations (OPD) within the Lampung Provincial Government and management domain which is still in the deficient category,

Keywords: Conformity, Good Governance, Implementation, SPBE, Working of the Law Theory.